

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dalam bab ini, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan temuan yang diperoleh dari penelitian lapangan serta pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Tahun 2019–2024, khususnya pada Misi 5 yang berfokus pada peningkatan kualitas pengelolaan pariwisata yang nyaman dan berkesan, belum berjalan secara optimal. Meskipun terdapat beberapa capaian positif seperti meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dan perhatian terhadap aspek keamanan kawasan wisata, kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya.

Beberapa persoalan yang ditemukan di lapangan antara lain adalah masih minimnya sarana dan prasarana pendukung wisata, kurangnya efisiensi dalam pemanfaatan anggaran, belum memadainya fasilitas umum, serta belum tercapainya prinsip pemerataan dan keadilan dalam pembangunan. Selain itu, meskipun kebijakan pembangunan telah sesuai dengan potensi lokal, pelaksanaannya belum sepenuhnya konsisten dan adaptif terhadap kondisi sosial dan lingkungan kawasan wisata. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang dirancang belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat dan wisatawan secara menyeluruh.

Oleh karena itu, evaluasi ini menunjukkan pentingnya peningkatan koordinasi, efisiensi anggaran, pelibatan masyarakat, serta konsistensi kebijakan agar tujuan pembangunan sektor pariwisata yang nyaman, berkesan, dan berkelanjutan di Kota Padang benar-benar dapat diwujudkan.

Dari enam aspek evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh William N Dunn yakni, efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketetapan. hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa aspek tersebut masih menyisakan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan pariwisata yang tertuang dalam RPJMD Kota Padang Tahun 2019–2024 pada Misi 5. Dari segi efektivitas, meskipun terdapat peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Pantai Padang, kualitas kenyamanan dan kesan terhadap destinasi belum sepenuhnya terpenuhi.

Dari sisi efisiensi, alokasi anggaran yang telah diberikan belum dimanfaatkan secara optimal, ditandai dengan masih kurangnya fasilitas dasar seperti toilet umum, tong sampah, dan beberapa titik yang perlu di berikan penerangan jalan. Pada aspek kecukupan, implementasi kebijakan belum optimal dalam menjangkau persoalan-persoalan fundamental, seperti kebersihan lingkungan dan penyediaan sarana penunjang kenyamanan bagi pengunjung. Sementara pada aspek pemerataan, manfaat pembangunan belum sepenuhnya dirasakan secara adil oleh masyarakat sekitar Pantai Padang

Pada aspek responsivitas, pemerintah telah menunjukkan upaya peningkatan keamanan melalui patroli rutin. Terakhir, dari sisi ketepatan, meskipun kebijakan telah disusun berdasarkan potensi lokal, pelaksanaannya belum berjalan konsisten dan berkelanjutan, serta kurang adaptif terhadap dinamika sosial di kawasan wisata.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan RPJMD Kota Padang pada Misi 5 belum berjalan secara optimal, dan masih diperlukan upaya evaluasi serta perbaikan yang menyeluruh agar tujuan pembangunan pariwisata yang nyaman, berkesan, dan inklusif dapat benar-benar tercapai.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan analisis terhadap enam aspek evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn, disarankan agar Pemerintah Kota Padang melakukan pembenahan secara menyeluruh dalam implementasi RPJMD Tahun 2019–2024, khususnya pada Misi 5 mengenai peningkatan kualitas pengelolaan pariwisata yang nyaman dan berkesan di kawasan Pantai Padang. Pertama, dari aspek efektivitas, Pemerintah perlu memastikan bahwa peningkatan jumlah wisatawan juga diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan dan kenyamanan destinasi.

Kedua, dari aspek efisiensi, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap pemanfaatan anggaran agar lebih tepat sasaran, khususnya dalam pengadaan fasilitas publik seperti toilet, tempat sampah, dan infrastruktur pendukung lainnya yang langsung berdampak pada pengalaman wisatawan. Ketiga, dari aspek kecukupan, kebijakan harus dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan riil di lapangan, termasuk pengelolaan sampah, kebersihan pantai, dan kenyamanan kawasan agar solusi yang diberikan tidak bersifat parsial. Keempat, dalam aspek pemerataan, diperlukan pendekatan yang lebih adil terhadap masyarakat lokal.

Kelima, dari segi responsivitas, dibutuhkan peningkatan sistem pelaporan dan penanganan keluhan yang cepat dan transparan, agar masyarakat dan wisatawan merasa dilibatkan dalam proses pembangunan. Terakhir, dari sisi ketetapan, Pemerintah perlu menjaga konsistensi pelaksanaan kebijakan secara berkelanjutan lintas periode Pemerintahan, serta menjadikan evaluasi sebagai bagian dari proses rutin dalam perumusan kebijakan.

Diharapkan, dengan langkah-langkah tersebut, kebijakan pembangunan pariwisata di Kota Padang dsapat menjadi lebih efektif, efisien, inklusif, dan berkelanjutan demi terwujudnya kawasan wisata yang benar-benar nyaman dan berkesan bagi seluruh lapisan masyarakat.

